

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran implementasi *smart sustainable city* dan *e-government* terhadap kinerja pemerintah di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 138 responden. Awalnya penelitian terdapat 152 kuesioner yang terkumpul, namun terdapat 14 jawaban responden yang tidak bisa digunakan dan dapat mempengaruhi hasil penelitian karena menunjukkan pola jawaban yang homogen. Objek pada penelitian ini adalah 52 OPD di Kota Padang. Untuk mengukur kinerja pemerintah dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu LAKIP tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketiga dimensi dari *smart sustainable city* yaitu *smart economy*, *smart social*, dan *smart environment* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran implementasi *smart sustainable city* berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah kota Padang. Artinya, semakin baik implementasi *smart sustainable city*, maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah.
2. *E-government* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-government*, maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah. *E-government* membantu pemerintah memberikan layanan yang efektif dan efisien. Dengan mengurangi kebutuhan untuk proses manual, *e-government* membantu menurunkan biaya administrasi dan mempercepat waktu pelayanan.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya mempertimbangkan implementasi *smart sustainable city* untuk tujuan menjadikan kota yang berkelanjutan dan cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang implementasi *smart sustainable city* dan *e-government* khususnya di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terkait peran implementasi *smart*

sustainable city dan *e-government* terhadap kinerja pemerintah kota. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan literatur bagi peneliti selanjutnya tentang *smart sustainable city* dan *e-government* serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah.

5.3 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terdapat kecenderungan responden untuk memberikan jawaban yang lebih positif yang dapat mengakibatkan hasil penilaian yang tidak sepenuhnya objektif dan bias. Dapat dilihat dari hasil pengumpulan data kuesioner yang menunjukkan bahwa cukup banyak responden mengisi kuesioner dengan poin tinggi terhadap semua indikator pertanyaan. Hal ini disebabkan karena responden pada penelitian ini adalah pegawai pemerintah itu sendiri yaitu ASN bukan masyarakat umum. Selain itu, penggunaan data sekunder pada penelitian ini juga mengurangi objektivitas terhadap variabel kinerja pemerintah karena menggunakan data dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2020-2024 yang disusun sendiri oleh pemerintah sehingga data bersifat subjektif.

5.4 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, direkomendasikan untuk menambah variabel lainnya sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah. Hal ini berkaitan dengan hasil uji koefisien determinan sebanyak 87,21% terdapat variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model untuk menjelaskan variabel kinerja pemerintah sebagai variabel dependen. Artinya, masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah. Peneliti selanjutnya bisa mengaitkan dengan variabel lain seperti *smart governance* dan literasi digital yang berpotensi meningkatkan hasil penelitian. Selain itu, berdasarkan keterbatasan penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian ini dengan metode survei untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah secara objektif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan masyarakat umum atau non ASN sebagai responden penelitian. Peneliti selanjutnya bisa mengukur kinerja pemerintah berdasarkan kepuasan masyarakat secara independen sehingga hasilnya menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan tidak bias.